



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sampang Tahun 2021 telah diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021, merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja juga kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara tertulis.

Penyusunan LKjIP ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dari para Stakeholders dilingkungan Organisasi Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor : 239/IX/6X8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja.

Sampang, Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Ir. R.P. MUHAMMAD ZIS, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19661210 199903 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5
D. Isu Strategis	8
E. Cascading Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10
F. Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18
G. Inovasi Pelayanan Publik	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	28
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	30
BAB IV PENUTUP	
Penutup	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Identifikasi Isu Strategis.....	9
Tabel 1.2 Format Cascading Renstra.....	11
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja	26
Tabel 2.2 Program Kinerja	27
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	29
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra.....	29
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DPRKP Tahun 2021	31

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi	4
Bagan 1.2 Proses Bisnis DPRKP	20
Bagan 1.3 Cascading Kinerja	16



A. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu pelaksana penyelenggara pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang dalam menyelenggarakan pembangunan berkewajiban mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Maksud penyusunan laporan akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam laporan akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas. Kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga program organisasi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPRKP KAB. SAMPANG

Berdasarkan Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

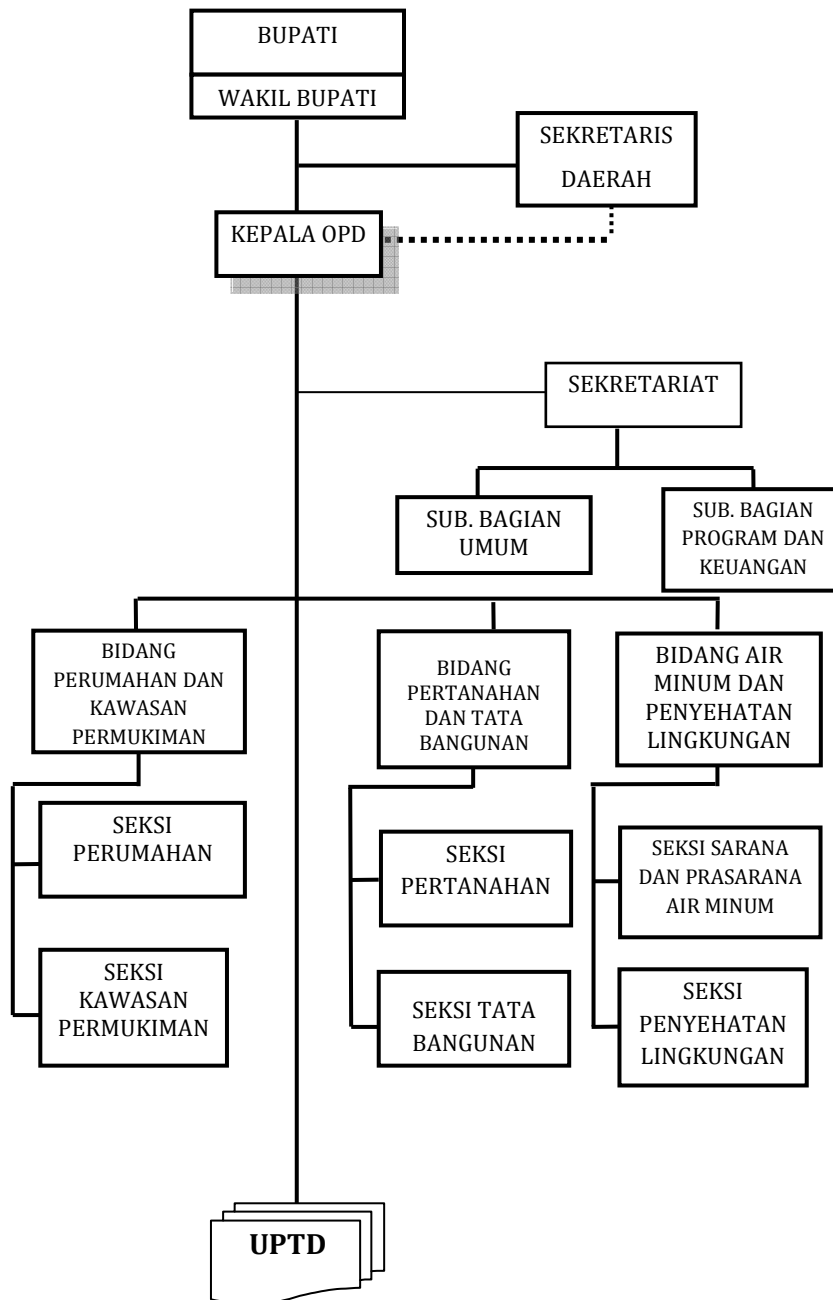
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Pertanahan
 - d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Perumahan
 2. Seksi Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Air Minum;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sampang

Bagan 1.1.



C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hubungan masyarakat dan protokol.

Bidang Tata Bangunan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan pertanahan.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi kawasan permukiman.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan.

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;

- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*"maintenance"*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan rekomendasi ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
- e. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan;
- f. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan;
- g. Pelaksanaan program pembangunan perumahan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- i. Perencanaan penataan bangunan;
- j. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pengelolaan gedung daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan;
- l. Pemberian rekomendasi ijin penghunian, persewaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan;
- m. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi dan pengelolaan pertanahan; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pemberikan rekomendasi izin penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- e. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten Sampang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pemberikan rekomendasi ijin sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis infrastruktur berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang:

1. Percepatan pembangunan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan IMB.
2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
3. Ketersediaan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase kurang optimal dan masih tingginya persentase kawasan kumuh di Kab. Sampang

Tabel 1.1 Identifikasi Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Target MDG's	Target MDGs akan kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat	
	Di sektor air minum dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan	Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) memberikan keleluasaan daerah untuk meningkatkan pembangunan sebagai wujud dari partisipasi publik	Adanya peraturan yang menunjang otonomi daerah	
	untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di perumahan dan permukiman	Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program	Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2020

E. CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi DPRKP selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran,penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dibuat acuan perjanjian kinerja

Tabel 1.2 Format Cascading Renstra
PERUBAHAN CASCADING RENSTRA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG
TAHUN 2019 - 2024

Mendukung Misi	: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing									
Tujuan RPJMD	: 1. Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing									
Sasaran RPJMD	: 4. Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman					<i>IS. 5 : Persentase perumahan dan permukiman sehat</i>				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM / KABID	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	KEGIATAN / KASI	SUB KEGIATAN / STAFF
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman	Persentase perumahan dan permukiman sehat	(\sum perumahan dan permukiman sehat - \sum kawasan kumuh)	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Cakupan Sarpras perumahan & permukiman	Luas Perumahan & permukiman yg ditangani (Km ²)	Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman	*Persentase RT yg menempati hunian dengan akses air minum aman	\sum RT yg menempati hunian dengan akses air minum aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
								\sum RT se-Kabupaten		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
		\sum perumahan dan permukiman			Luas Wilayah Perumahan & Permukiman (Km ²) (RTRW)					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
										Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
									Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	

										Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
										Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	*Persentase RT yg menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	\sum RT bersanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
								\sum RT se-Kabupaten		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
										Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
										Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Panjang Jalan & Drainase baik	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
								panjang Jalan	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan

							& Drainase Pemukiman		Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
									Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni	\sum RTLH yg Tertangani \sum RTLH Se Kab. Sampang	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
							*Persentase warga negara korban bencana Kab./kota yg memperole h rumah layak huni	\sum rumah korban bencana yg ditangani \sum rumah korban bencana	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab./kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Pembangunan rumah bagi korban bencana
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan kumuh	Panjang Jalan & Drainase baik kawasan kumuh Panjang Jalan & Drainase	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)

								kawasan kumuh		Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
							Persentase Penyediaan rumah layak huni	\sum RTLH yg Tertangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
								\sum RTLH Se Kab. Sampang		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan Infrastruktur Perumahan	Panjang Jalan & Drainase Perumahan baik	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
								panjang Jalan & Drainase Perumahan		
				Persentase Bangunan Gedung pemerintah yg Laik Fungsi	\sum Gedung Pemkab yg Bersertifikat Laik Fungsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perentase bangunan gedung pemerintah yg Layak	\sum bangunan gedung yg Layak	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				\sum Bangunan Gedung Pemkab	\sum Bangunan Gedung Pemerintah			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		
								Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		

										Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
				Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	∑ Permasalahan Tanah Pemkab yg diselesaikan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat tentang pertanahan	∑ Sengketa Tanah Pemkab yg ditangani	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					∑ Tanah Pemerintah yg bermasalah			∑ sengketa tanah yg dilaporkan		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	% Ganti kerugian Tanah Pemkab	∑ Penyelesaian ganti rugi	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
								∑ Lahan yg dibebaskan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg difasilitasi		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat										

								Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Mebel	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin	

								Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lainnya
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

F. PETA PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BerikutPeta Proses BisnisDPRKPKabupatenSampang :

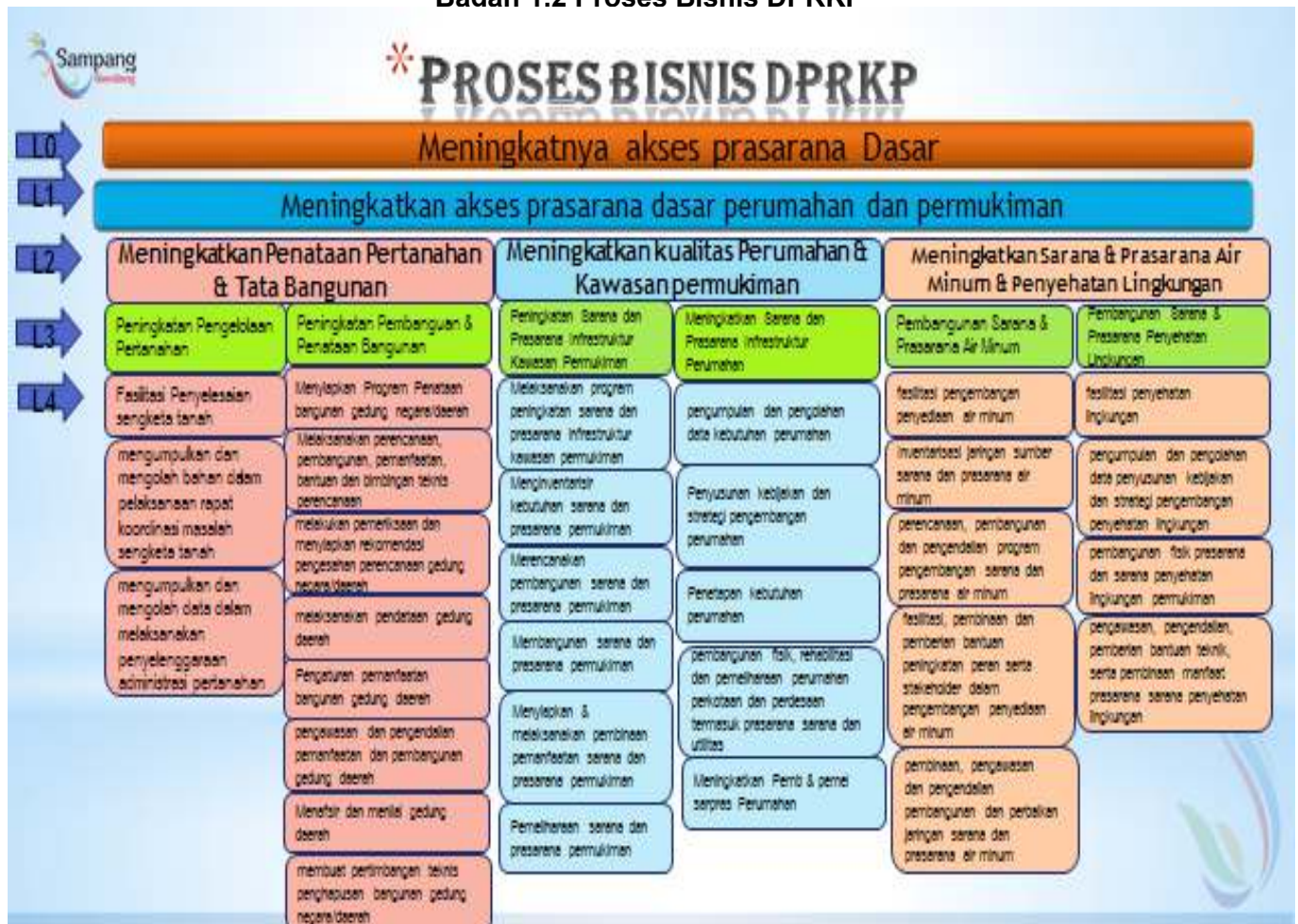
PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

VISI : SampangHebatBermartanat

MISI : Mewujudkan sumberdayamanusia yang berkualitasdanberdayasaing

TUJUAN : Terbangunnyasumberdayamanusia yang berkualitasdanberdayasaing

Baan 1.2 Proses Bisnis DPRKP



G. INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu rodapenggerak pertumbuhan ekonomikawasan permukiman perkotaan khususnya wilayah Kecamatan Sampang. Pengembangan jaringan infrastruktur di kawasan perkotaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan. Pembangunan jalan lingkungan sampaisaat ini telah banyak dirasakan manfaatnya bagi pemenuhan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan. Informasi ketersediaan jalan terutama di kawasan perkotaan Kecamatan Sampang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perencanaan dan pembangunan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang telah mempunyai database jalan lingkungan perkotaan, namun seiring dengan adanya perubahan pada kuantitas dan kualitas maka perlunya Sistem Informasi Dasar Jalan Lingkungan yang menyajikan data yang lengkap, akurat dan akurat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengadakan program **GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan)** yang bertujuan menyediakan informasi mengenai kelayakan jalan lingkungan yang lengkap, akurat dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penanganan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman perkotaan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar jalan lingkungan dilakukan penyusunan Survey Investigasi Desain Jalan dan Saluran Drainase Kecamatan Sampang, juga melibatkan tim survey saran dan prasarana untuk mengevaluasi kelayakan jalan lingkungan.

Maksud pelaksanaan program GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan) adalah menghasilkan dokumen hasil investigasi kelayakan

jalan lingkungan yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan jalan yang terpadu dan bersinergi. Adapun tujuan program GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan) adalah perencanaan infrastruktur jalan lingkungan baik untuk pembangunan jalan dan pemeliharaan, yang nantinya dapat diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat perkotaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam program GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen hasil survey investigasi infrastruktur sebagai acuan pelaksanaan penanganan infrastruktur bagi seluruh pelaku (stakeholder).
2. Tersedianya strategi dan skala prioritas perencanaan infrastruktur secara spatial dan tipologi, indikasi program dan kegiatan penanganan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Aspek kreatif dan inovatif dari program **GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan)** yaitu kegiatan GAYA JALITA melibatkan Tim survey sarana dan prasarana yang mempunyai tugas melakukan investigasi kelayakan jalan lingkungan perkotaan dengan melakukan pengecekan kondisi jalan, titik koordinat. Hal ini untuk usulan rencana skala prioritas terkait penanganan yang sesuai dengan kondisi jalan baik dilakukan pembangunan atau pemeliharaan. Kedepannya program ini akan dilakukan pengembangan dengan menggunakan Aplikasi E-Jalan Kota Sampang (E-JAKOSA) yang akan melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat bisa mengusulkan jalan lingkungan perkotaan yang perlu dilakukan penanganan secara tepat dan cepat melalui aplikasi.

A. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Program Survey Investigasi Design Jalan Lingkungan Perkotaan dimulai sejak 2018 (jalan kawasan kumuh perkotaan), 2019 (jalan lingkungan perkotaan), dan 2021 (Rencana revisi dan aplikasi E-Jalan Kota Sampang/E-JAKOSA). Untuk program di tahun 2021, akan melakukan perbaikan data jalan lingkungan perkotaan dan akan dibuatkan Aplikasi E-Jalan Kota Sampang (E-JAKOSA). Aplikasi ini untuk memudahkan digunakan oleh OPD terkait (DPRKP dan Kelurahan). Sehingga kedepannya pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan tidak umpang tindih.

Tahapan Pelaksanaan antara lain :

1. Tahap persiapan

Padat ahap ini meliputi kajian awal data sekunder, menyusun rencana kerja tim, menyusun desain survey, menyiapkan dan persiapakan teknis lainnya.

2. Tahap survey dan pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan kegiatan survey / pengecekan langsung lapangan. Survey yang dilakukan meliputi survey pengukuran/ penentuan lokasi, survey dan pengumpulan data konstruksi jalan, dan survey pengukuran dan pengumpulan data jalan.

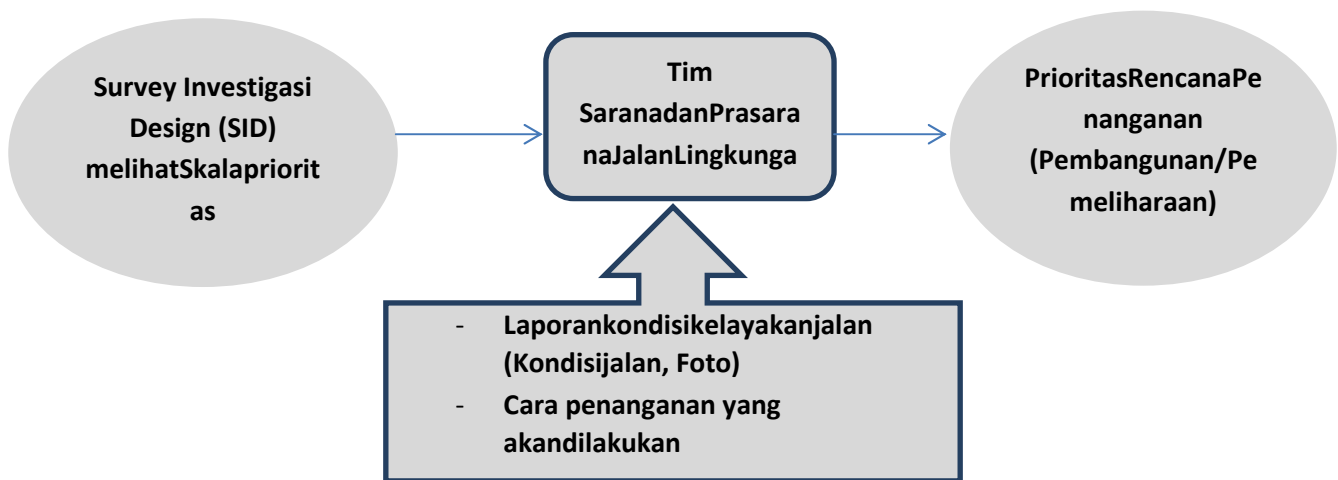
3. Tahap pengolahan data

Dalam tahap ini yang diperoleh data hasil survei diinventarisir dan dikumpulkan dalam bentuk tabulasi data yang akan dijadikan sebagai data base. Kemudian setelah tabulasi data dilakukan dilanjutkan plotting data base tersebut ke dalam petagris digital dalam bentuk ArcGIS. Ploting data base ke dalam petagris digital dilakukan untuk menggabungkan data atribut dan data spasial yang nantinya akan dijadikan system informasinya.

4. Tahap Analisa

Padat ahap ini analisa yang dilakukan antara lain:

- a. Analisis penentuan prioritas pembangunan/peningkatan jalan selama tahun ke depan. 5
- b. Analisis proyeksi perencanaan jalan lingkungan.
- c. Analisis perhitungan kerusakan jalan.
5. Tahap penyusunan laporan dan rencana penanganan.
- Tahap penyusunan laporan merupakan kegiatan penyusunan laporan hasil investigasi dan rencana penanganan yang akan dilakukan secara cepat dan tepat.



Penerapan program GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan) antara lain:

- Melakukan penanganan yang sesuai dengan hasil investigasi kelayakan jalan lingkungan perkotaan.
- Penanganan yang sudah dilakukan harus dimasukkan ke dalam program ArcGIS untuk mengetahui capaian kinerja yang sudah dilakukan penanganan di lapangan.
- Menggerakkan seluruh tim teknis dan masyarakat kedepannya untuk selalu memberikan informasi yang terkini tentang kondisi jalan lingkungan disekitarnya.

B. DAMPAK DAN BERKELANJUTAN

Dengan dilakukan program **GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan)** diperoleh manfaat antara lain :

- Analisis data yang dihasilkan bisa memberikan informasi untuk dapat menentukan jenis penanganan yang paling tepat.
- Hasil penanganan yang dilakukan lebih terarah dan berkesinambungan, sehingga program ini diharapkan bisa dikembangkan untuk memperoleh penanganan yang cepat.
- Data penanganan jalan lingkungan perkotaan lebih tertata, sehingga pembangunan jalan lingkungan lebih berkembang.

Kelanjutan dari program **GAYA JALITA (Investigasi Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan)** untuk mengetahui adanya kendala atau permasalahan yang dihadapi di lapangan dan diinventarisir selanjutnya dilakukan Rencana Penanganannya sampai pelaksanaan tindak lanjutnya.

Proses inovasi saat ini terus dilaksanakan dan akan dikembangkan melalui aplikasi E-Jalan Kota Sampang (E-JAKOSA) yang memudahkan masyarakat memberikan informasi kondisi jalan lingkungannya. Harap kedepannya hasil investigasi bisa memberikan langkah kongkrit untuk kemajuan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan lingkungan perkotaan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


Dokumen Renstra (Rencana Strategis) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi Renstra dan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Per

mukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021:

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja










**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABUPATEN SAMPANG 2021**

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 <p>1. Meningkatnya Akses Prasarana dasar perumahan dan permukiman</p>	1. Cakupan Sarpras Perumahan dan Permukiman	69,65%	DPRKP
	2. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi	2,30%	
	3. Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan	38,33%	

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan DPRKP Kabupaten Sampang berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, DPRKP Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 62.077.935.945 yang digunakan untuk melaksanakan sub kegiatan 57 dan 17 kegiatan yang terangkum dalam 9 program sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Kinerja

PROGRAM KINERJA

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.402.174.270
 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30.752.156.633
 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.823.523.003
 Program Pengembangan Permukiman	4.448.809.171
 Program Penataan Bangunan Gedung	5.745.012.684
 Program Kawasan Permukiman	4.871.301.457
 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	924.853.468
 Program Penyelesaian Sengketa dan Tanah Garapan	21.065.178
 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	89.031.071
JUMLAH	62.077.935.945

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun sebelumnya.

Beberapa sasaran strategis berikut indikator kerjanya dapat dicapai atau merupakan keberhasilan, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD

A. Realisasi Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran RPJMD			Realisasi	Tahun 2021		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Akses Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman	Presentase perumahan dan permukiman sehat	%	67,13	69,65	69,70	100,08%

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Pada indikator kinerja persentase perumahan dan permukiman sehat, terealisasi sebanyak 651 perumahan dan permukiman yang ditangani dari total 934 perumahan dan permukiman atau dusun terealisasi sebesar 69,70% dari target sebesar 69,65% perumahan dan permukiman sehat.

Dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perumahan dan permukiman sehat (dusun)}}{\text{Jumlah perumahan dan permukiman}} = \frac{651}{934} \times 100\% = 69,70\%$$

Sasaran Renstra			Realisasi	Tahun 2021		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar	1. Cakupan Sarpras Perumahan dan Permukiman	%	57,97%	60%	60,76%	101,26%
	2. Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang Laik Fungsi	%	0,57%	2,30%	2,30%	100%
	3. Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan	%	20%	38,33%	38,33%	100%

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DPRKP Kabupaten Sampang Tahun 2021, total anggaran belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp. 62.077.925.935. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.011.438.848 dan belanja langsung sebesar Rp. 58.066.487.087. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPRKP Kabupaten Sampang tahun 2021 sebagai berikut:

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

NO	URAIAN	ANGGARAN			Output/Keluaran			
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.000.000.000	148.485.513	15	Izin Mendirikan Bangunan	12 bulan	12 bulan	100
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000	106.188.114	35	Tower Telekomunikasi	12 bulan	12 bulan	100
B	BELANJA LANGSUNG	62.077.925.935	59.607.275.052	96				
	GAJI	4.011.438.848	3.203.732.049	80				
	NON GAJI	58.066.487.087	56.403.543.003	97				
	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator			
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	1.390.734.422	969.733.545	70	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.003.780	2.973.772	99	Jumlah penyusunan dokumen renja	1 dok	1 dok	100%
					Jumlah penyusunan dokumen perubahan renstra	1 dok	1 dok	100%
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.018.240	2.997.660	99	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	100%
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3.002.840	2.995.628	100	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3 RKA perubahan	3 RKA perubahan	100%
4.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.998.185	2.977.672	99	Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100%
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.032.105	3.000.420	99	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 dok DPPA	1 dok DPPA	100%
6.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	6.001.280	5.996.652	100	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dok	4 dok	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	30.942.586	27.478.750	89	Jumlah ATK	12 bln	12 bln	100%
2.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3.016.475	3.016.176	100	- Jumlah verifikasi SPJ	662 spp	662 spp	100%
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.999.150	2.979.040	99	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	1 dok	100%
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3.014.150	2.881.256	96	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	113.329.000	4.839.000	4	Jumlah PNS yang dikut diklat	12 PNS	3 PNS	
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	82.609.509	63.994.750	77	Jenis komponen instalasi listrik	9 jenis	9 jenis	100%
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.356.244	32.357.835	66	Penyediaan alat kebersihan	21 jenis	21 jenis	100%
					- Penyediaan dekorasi	3 jenis	3 jenis	100%

					- penyediaan kelengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.228.643	22.384.892	31	Jumlah kebutuhan fotocopy	12 b;n	12 bln	
					Jumlah barang cetakan	16 jenis	5 jenis	10%
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	100%
5.	Fasilitasi kunjungan tamu	13.702.500	8.576.000	63	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bln	12 bln	100%
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	206.048.832	91.492.105	44	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	100%
					Jumlah rapat perjalanan dinas biasa	12 bln	12 bln	100%
					Jumlah rapat perjalanan dinas dalam kota	12 bln	12 bln	100%
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.	Pengadaan mebel	52.583.930	52.092.700	99	Jumlah pengadaan mebel	5 buah	5 buah	100%
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	113.609.095	112.886.725	99	Jumlah pengadaan barang	14 unit	14 unit	100%
3.	Penyediaan jasa surat menyurat	17.864.850	2.159.000	12	Jumlah surat terkirim	500 surat	361 surat	80%
4.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	132.000.000	128.278.000	97	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bln	12 bln	100%
5.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.790.753	46.871.348	59	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 dok	1 dok	100%
6.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	29.050.000	16.603.000	57	- Jumlah perbaikan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	100%
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	82.200.000	74.069.150	90	Jumlah KIR	2 unit	2 unit	100%
					- Jumlah pemeliharaan kendaraan	5 kendaraan	5 kendaraan	100%

					- Jumlah STNK	38 stnk	38 stnk	100%
2.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265.579.775	252.232.014	95	Jumlah perbaikan gedung kantor	12 bln	12 bln	100%
					- Jumlah rehab	1 aula	1 aula	100%
F.	Penataan Organisasi							
1.	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	15.162.500	-		- Jumlah pawai	1 pawai	0	0
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30.752.156.633	29.948.896.883	97	- Persentase RT berakses Air Minum	83,45%	83,35%	99%
A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota							
1.	Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis SPAM	977.405.063	963.945.025	99	Tersusunnya rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1 Perencanaan paket	1 Perencanaan paket	100%
					Tersusunnya rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1 SID pkt	1 SID pkt	100%
					Tersusunnya rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1 DED pkt	1 DED pkt	100%
2.	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	1.400.681.226	1.258.677.282	90	Terlaksananya supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	9 paket	9 paket	100%
3.	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	21.410.960.166	21.334.416.701	100	Jumlah jaringan pipa distribusi SPAM kanjar yang dibangun	1 paket	1 paket	100%
					Jumlah SPAM perdesaan dibangun	37 paket	37 paket	100%
					Terbangunya SPAM dikawasan perdesaan	36 paket	36 paket	100%
4.	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	6.101.145.098	5.714.810.838	94	Jumlah SPAM yang dibangun dikawasan diperkotaan	1 paket	1 paket	100%
5.	Operasi dan pemeliharaan SPAM dikawasan perkotaan	861.965.080	677.047.037	79	Terlaksananya pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	12 bln	12 bln	100%
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.823.523.003	9.716.810.038		Persentase RT berakses sanitasi	79,52%	79,31%	99%

A.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota							
1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kab/kota	17.429.212	9.372.816	54	Terlaksananya penyusunan rencana, kebijakn, strategi dan tejnis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kab/kota	1 dok	1 dok	75%
2.	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	303.548.267	283.571.764	93	Terbangunnya MCK	6 paket	6 paket	100%
					Terbangunnya MCK & IPAL komunal	7 paket	7 paket	100%
					Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi tangki septic individual	10 paket	10 paket	100%
3.	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	4.156.480.663	4.143.034.268	100	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi	10 paket	10 paket	100%
					- Terbangunnya MCK	6 paket	6 paket	100%
4.	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	121.377.013	102.055.078	84	- Jumlah peserta pelatihan	100 org	100 org	100%
5.	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	721.069.447	701.282.348	97	Jumlah MCK & SPALD yang dipelihara	12 bln	12 bln	100%
6.	Pembangunan /penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	4.486.279.003	4.468.828.840	100	RT berakses sanitasi	1625 RT	1625 RT	100%
4.	Program Pengembangan Permukiman	4.448.809.171	4.379.312.937	98	Penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman	65,60%	65,54%	99%
A.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota							
1.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman dikawasan strategis daerah kab/kota	3.995.144.192	3.933.774.100	98	- Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	5 paket	5 paket	100%
					- Jumlah saluran drainase yang dibangun	7 paket	7 paket	100%
2.	Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman dikawasan strategis daerah kab/kota	343.117.940	341.437.037	100	- Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	4 paket	4 paket	100%

					- Jumlah saluran drainase yang dibangun	2 paket	2 paket	100%
3.	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman dikawasan strategis daerah kab/kota	110.547.039	104.101.800	94	Dokumen SID jalan dan drainase lingkungan perkotaan	1 dok	1 dok	100%
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	5.745.012.684	5.620.965.940	98	Persentase bangunan gedung pemerintah yang layak	67,24%	67,24%	100%
A.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
1.	Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	128.712.443	93.133.940	72	Terlaksananya IMB, SLF, TABG & SIMB	12 bln	12 bln	100%
2.	Perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kab/kota	5.373.616.143	5.316.599.000	99	Terpeliharanya dan terawatnya gedung daerah	6 gedung	6 gedung	100%
3.	Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung kab/kota	171.082.785	156.416.000	91	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok	100%
4.	Monitoring dan evaluasi penyelenggara bangunan gedung negara daerah kab/kota	71.601.313	54.817.000	77	Jumlah monitoring dan evaluasi gedung negara daerah kab/kota	12 bln	12 bln	100%
6.	Program Kawasan Permukiman	4.871.301.457	4.782.987.060	98	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani	5,26%	5,25%	99%
A.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha							
1.	Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	71.957.229	55.812.100	78	profil kawasan kumuh kabupaten sampang	1 dok	1 dok	100%
B.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha							
1.	Penyusunan rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	262.590.511	233.111.300	89	Baseline data permukiman kumuh	3 dok	3 dok	100%
2.	Perbaikan RTLH	4.487.784.052	4.466.938.660	100	Jumlah RTLH yang direhab	197 rumah	197 rumah	100%
3.	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	48.969.665	27.035.000	55	Jumlah koordinasi pelaksanaan	2 keg	2 keg	100%

					pembangunan permukiman kumuh			
7.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	924.853.468	920.487.100	100	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU	70%	70%	100%
A.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							
1.	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	924.853.468	920.487.100	100	Jumlah PSU yang tersedia dan terpelihara	9 perumahan	9 perumahan	100%
8.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	21.065.178	3.730.500	18	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan	16%	16%	100%
A.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota							
1.	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah kab/kota	7.155.385	2.742.500	38	Jumlah ganti rugi dan satuan tanah terselesaikan	12 bln	12 bln	100%
2.	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah kab/kota	13.909.793	988.000	7	Jumlah sengketa lahan dari pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 bln	12 bln	100%
9.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	89.031.071	60.709.000	68	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan	16%	16%	100%
A.	Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kab/kota							
1.	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah kab/kota	71.613.685	60.709.000	85	Jumlah pelaksanaan survey dan pengukuran tanah instansi pemerintah/pe mda	1 dok	1 dok	100%
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota	17.417.386	-	0	Jumlah sengketa lahan dari pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 bln	0	0



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatkan potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021 semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPRKP dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021 Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.